

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah PT. Pos Indonesia (*Persero*)

Berawal dari gagasan, kemudian berkembang seiring kebutuhan, gagasan untuk memperlancar arus surat menyurat selama era kolonial Belanda telah diwujudkan oleh Gubernur Jenderal G. W. Baron dengan mendirikan kantor pos yang pertama di Batavia pada tanggal 26 Agustus 1946. Peranan kantor pos semakin penting dan berkembang setelah penemuan teknologi telegram dan telepon, sehingga dibentuk Jawatan Pos Telegram (Jawatan PTT) berdasarkan statlad nomor 395 tahun 1906.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang perusahaan negara Hindia Belanda (*Indische bedrijvwet / IBF*). Sejak tahun 1907 Jawatan Pos Telegram (Jawatan PTT) dipegang oleh departemen perusahaan-perusahaan pemerintah (*Departement Van Government Bedrijvenment*).

Seiring datang tibanya Jepang yang mengambil ahli kekuasaan Belanda di Indonesia, Jawatan PTT Jawa dan Jawatan PTT Sulawesi. Jawatan PTT Republik Indonesia berdiri secara resmi pada tanggal 27 September 1945 setelah dilakukan pengambilan alih kantor pos PTT di Bandung oleh angkatan muda PTT (*AMPTT*) dari pemerintah militer Jepang. Dalam peristiwa ini gugur sekelompok pemuda anggota angkatan muda PTT sehingga pada tanggal tersebut menjadi tonggak awal berdirinya Jawatan PTT Republik Indonesia dan diperingati setiap tahunnya sebagai

bakti PTT, yang kemudian menjadi hari bakti pariwisata, pos dan telekomunikasi (PARPOSTEL).

Pada tanggal 27 Desember 1949, Jawatan PTT mulai memusatkan perhatiannya pada pembangunan yang meliputi bidang kepegawaian, keuangan, perbaikan perlengkapan bangunan yang rusak dan pembangunan gedung yang baru. Pada tahun 1960 pemerintah mengadakan reorganisasi alat-alat produksi dan distribusi yang ditunjukkan kearah pelaksanaan pasal 33 UUD 1945. Untuk itu dikeluarkan UU No. 19 prp Tahun 1960. Berdasarkan UU tersebut semua perusahaan yang modal keseluruhannya merupakan kekayaan negara, baik yang terjadi karena pemisahan dari kekayaan negara maupun karena nasionalisasi, menjadi Perusahaan Negara (PN).

Dengan PP No. 240 Tahun 1961, dibentuklah perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN POSTEL). Dengan PP No. 30 Tahun 1965, PN POSTEL dipecah menjadi dua perusahaan yaitu PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi. Dengan dikeluarkannya UU No. 9 Tahun 1965 Status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikelompokkan menjadi tiga status yaitu: Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan Umum (perum), dan Perusahaan Perseroan (persero).

Selanjutnya status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perum Pos dan Giro berdasarkan PP No. 24 tahun 1978. Kemudian ditetapkan PP No. 3 Tahun 1983 yang mengatur tata cara pengawasan dan pembinaan Perjan, Perum, dan Persero untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru tersebut PP No. 9 Tahun 1978 yang mengatur tentang Perum Pos dan Giro diganti dengan PP No. 24 Tahun 1984.

Dengan semakin meningkatnya permintaan masyarakat akan pelayanan jasa pos serta dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha penyelenggaraan jasa pos dan giro. Maka perum Pos dan Giro dirubah statusnya menjadi PT. Pos Indonesia (*Persero*) yang diatur melalui PP No. 5 Tahun 1995 tanggal 27 Febuari 1995.

Tentang pengalihan status Perum Pos dan Giro menjadi perusahaan Perseroan dengan nama PT. Pos Indonesia (*Persero*) yang secara resmi telah terdaftar dengan akta notaris Sutjipto., SH No. 107 tahun 1995 tanggal 20 Juni 1995.

B. Visi, Misi dan Tujuan PT. Pos Indonesia (*Persero*)

1. Visi PT. Pos Indonesia (*Persero*)

”Menjadi perusahaan pos yang berkemampuan memberikan solusi terbaik dan menjadi pilihan utama stakeholder domestik maupun global dalam mewujudkan pengembangan bisnis dengan pola kemitraan yang di dukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan menjunjung tinggi nilai

2. Misi PT. Pos Indonesia (*Persero*)

- ”Memberikan solusi terbaik bagi bisnis, pemerintah, dan individu melalui penyediaan sistem bisnis dan layanan komunikasi tulis, logistik, transaksi keuangan, dan filateli berbasis jejaring terintegrasi, terpercaya dan kompetitif di pasar domestik dan global”.
- Serta keyakinan dasar yaitu Karyawan yang bertalenta, keunggulan layanan, nilai-nilai bagi pelanggan dan pertumbuhan kinerja keuangan

yang tinggi dan berkelanjutan. Dan dibarengi dengan nilai-nilai dasar berupa: regangkan tujuan, integritas, berfikir kesisteman, berani dan bertanggung jawab, dan penghargaan berbasis kinerja.

C. Lokasi Perusahaan.

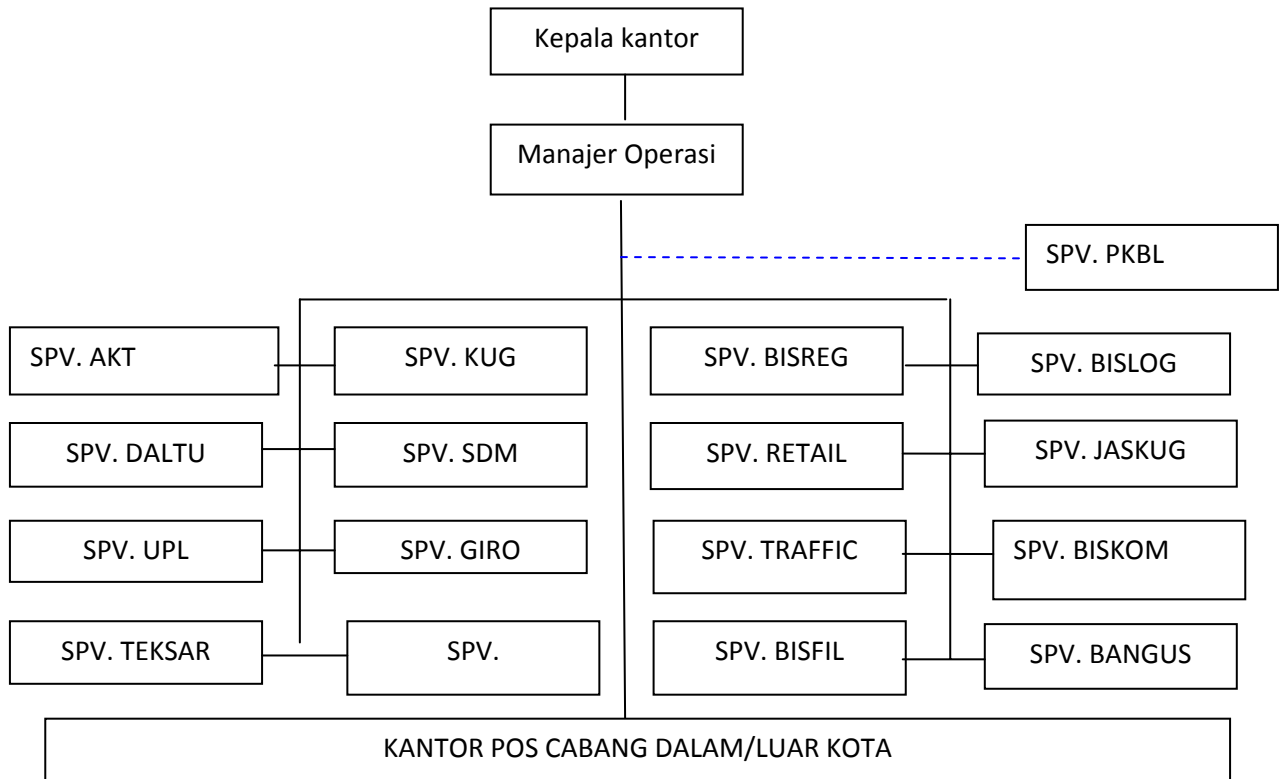
Letak yang strategis sangat menguntungkan bagi PT. Pos Indonesia (*Persero*) bagian jasa keuangan, dimana PT. Pos Indonesia (*Persero*) dilalui oleh rute angkutan kota. Selain itu juga lokasi yang berada ditengah-tengah pusat kota yang mendukung sehingga PT. Pos Indonesia (*Persero*) mudah dicapai oleh kalangan masyarakat. Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Berlokasi Jalan Penembahan Senopati No 2 Yogyakarta Indonesia 55121, dan memiliki beberapa agen pembantu. Pemilihan letak perusahaan merupakan hal penting sehingga perlu diperhitungkan beberapa aspek yang mempengaruhinya, demi memperlancar proses produksi maupun pemasarannya.

D. Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam menjalankan usahanya, PT. Pos Indonesia (*Persero*) memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan para pemegang fungsi atau jabatan dari tingkat yang paling atas sampai tingkat yang paling bawah dalam suatu organisasi. Adapun struktur organisasi PT. Pos Indonesia (*Persero*) adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR POS YOGYAKARTA 55000



E. Personalia Perusahaan

PT. Pos Indonesia (*Persero*) memiliki berbagai macam layanan yang dapat diperoleh di kantor pos seluruh Indonesia pada bagian ini, penulis hanya akan mencantumkan bisnis yang di jalan oleh PT. Pos Indonesia (*Persero*) di kantor pos Yogyakarta yang berkaitan dengan pelanggan di bagian jasa keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan karena hanya berhubungan dengan layanan yang digunakan oleh pelanggan bagian jasa keuangan. Kategori dan jenis produk :

1. Kiriman uang berupa wesel pos dalam negeri (standar, prima, instan, pelanggan, dan kemitraan), wesel pos luar negeri (internasional) *money order* dan *western union*). Terdapat juga duit pos multi guna yang bisa digunakan untuk mengirim uang, menyimpan uang, dan mengisi pulsa.
2. SOPP (System Online Payment Point) berupa pembayaran tagihan (rekening telepon, telepon seluler, asuransi, kredit, penerimaan pajak, pembayaran tiket, dan isi ulang pulsa seluler).
3. Penyaluran dana dan giro pos.
 - a. Penyaluran dana diberikan kepada masyarakat maupun kepada pihak-pihak tertentu yang telah ditetapkan dan diatur melalui perjanjian kerjasama, antara lain: pembayaran pensiun PNS dan ABR, penyaluran dan subidi pemerintah.
 - b. Giro pos merupakan layanan transaksi keuangan berbasis rekening Koran sebagai alternative layanan perbankan dengan jangkauan luas dan tersebar di seluruh Indonesia serta terhubung secara real time online.
4. Tabungan (Bank Muamalat Indonesia shar- E dan Bank Tabungan Negara e-Batara pos).

Jumlah seluruh karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) bagian jasa keuangan saat ini adalah 15 karyawan yang terdiri dari 5 pria dan 10 wanita dari berbagai tingkat jabatan. Latar belakang pendidikan karyawan minimal SMA, D1, D2, D3, S1 dan S2. Sistem pengupahan yang berlaku berdasarkan UMP (Upah Minimum Provinsi), gaji diberikan setiap bulannya.

Hari dan jam kerja yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Office

Hari Senin-Sabtu : 08.00 WIB – 20.00 WIB

Hari Minggu Libur : Libur

2. Operasional

Hari Senin-Sabtu : 08.00 WIB – 20.00 WIB